

PERISTIWA ANDI AZIS DI SULAWESI SELATAN 5 APRIL 1950 (ANDI AZIS EVENTS IN SOUTH SULAWESI 5 APRIL 1950)

Bahtiar, Ansaar, Sritimuryati

Balai Pelestarian Nilai budaya Sulawesi Selatan
bahtiarnadja@yahoo.com

Abstract

This study aims to explain how Andi Azis's role at that time led a movement to capture and kidnap several TNI officials, with the aim that the top TNI leadership prevented and canceled the landing of the Worang Battalion to secure South Sulawesi. In this study using the method, namely the historical method, through four stages such as heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study showed that in South Sulawesi demonstrators were rife to disperse the NIT (Negara Indonesia Timur), Andi Azis, triggered by Soumokil to immediately carry out his action, then in the early morning Wednesday, April 5, 1950 arrested and abducted several members of the TNI (Indonesian National Army). Andi Azis wishes to keep the NIT standing, besides that there are other ambitions from Andi Azis in the TNI. Because with the continued existence of the NIT, the desire of a number of NIT officials or officials to form a federation (federalist) country continues. Thus it was opposed by supporters of the unitary state (unitarist), namely from the nobility and civilians. The Andi Azis incident only lasted one day, because the TNI quickly took over security in Makassar. This incident caused Andi Azis to be asked to surrender, then the trial process took quite a long time.

Keywords: Events, Andi Azis, South Sulawesi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana peranan Andi Azis pada masa itu memimpin suatu gerakan untuk menangkap dan menculik beberapa petinggi TNI, tujuannya agar pucuk pimpinan TNI mencegah dan membatalkan pendaratan Batalyon Worang untuk mengamankan Sulawesi Selatan. Dalam kajian ini menggunakan metode, yaitu metode sejarah, dengan melalui empat tahap seperti heuristik, kritik, Interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan di Sulawesi Selatan saat itu marak demonstrasi untuk membubarkan NIT (Negara Indonesia Timur), Andi Azis dengan dipicu oleh Soumokil agar segera melakukan aksinya, maka di pagi buta hari Rabu tanggal 5 April 1950 menangkap dan menculik beberapa anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia). Keinginan Andi Azis agar NIT tetap berdiri, selain itu ada ambisi lain dari Andi Azis dalam TNI. Karena dengan tetap eksisnya NIT, maka keinginan beberapa petinggi atau pejabat NIT untuk membentuk negara federasi (federalis) tetap berjalan. Dengan demikian mendapat penentangan dari pendukung negara kesatuan (unitaris), yaitu dari kaum bangsawan dan sipil. Peristiwa Andi Azis hanya berlangsung 1 hari, karena TNI dengan cepat mengambil alih keamanan di Makassar. Kejadian ini membuat Andi Azis diminta menyerahkan diri, selanjutnya proses pengadilannya yang memakan waktu cukup lama.

Kata Kunci: Peristiwa, Andi Asis, Sulawesi Selatan.

PENDAHULUAN

Kenyataan politik di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya setelah pengakuan kedaulatan atas negara Republik Indonesia Serikat (RIS) menunjukkan semakin hangat. Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, tanggal 23 Agustus-2 November 1949, dinyatakan bahwa pemerintah Belanda akan menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada RIS dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, karena mengakui RIS sebagai negara merdeka yang berdaulat. Demikian yang dinyatakan dalam pasal satu ayat satu dari piagam penyerahan kedaulatan, dan ayat tiga dalam pasal itu dinyatakan bahwa kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Realisasi dari rencana itu ternyata terjadi tiga hari sebelum jangka waktu ditetapkan, yaitu tanggal 27 Desember 1949 (Kadir, dkk. 1984: 233).¹

Kedaulatan yang diperoleh dalam bentuk negara serikat tidak dapat bertahan, pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai satu kesatuan dari rakyat Indonesia yang berada di bagian timur, selanjutnya sebagai salah satu negara yang tergabung dalam RIS, namun tidak mendapat tempat di hati rakyat Sulawesi Selatan. Mulai awal bulan Maret 1950 pergolakan dan penentangan antara golongan federalis dan unitaris di Sulawesi Selatan terutama di Makassar berkobar dengan hebat, sehingga timbul suasana yang genting. Kelompok pemuda di jalan-jalan mulai menyatakan sikap mereka menentang kelanjutan berdirinya NIT (Agung, 1985: 714).

Dari golongan unitaris yang dipelopori oleh anggota-anggota Parlemen Fraksi Kesatuan Nasional dan Fraksi Indonesia, mendesak kepada pemerintah untuk diijinkan mengadakan demonstrasi secara besar-besaran. Dengan tujuan untuk menyatakan unjuk rasa agar NIT segera dibubarkan dan dimasukkan ke dalam daerah kekuasaan Republik Indonesia. Oleh Kabinet Tatengkeng sudah mengadakan keputusan untuk melarang semua demonstrasi dari pihak manapun, maka keinginan golongan unitaris tidak dapat dilaksanakan. Desakan untuk mengadakan demonstrasi dengan tujuan sebagaimana diutarakan di atas, mendapat perangsang lebih keras lagi setelah Badan Perwakilan Rakyat Sementara Serikat (BPRSS) di Jakarta, tanggal 2 Maret 1950 menerima suatu mosi. Mosi untuk membubarkan semua negara-negara dan daerah-daerah, kecuali Sumatera Timur dan daerah Kalimantan. Sebagai akibat mosi tersebut dikeluarkan suatu Keputusan Presiden RIS, dengan menunjuk Undang-Undang Darurat yang telah disahkan. Untuk membubarkan negara-negara Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura dan Pasundan, kemudian menggabungkan dengan negara Republik Indonesia (Agung, 1985: 715; Arsip NIT No, 97; Kadir, dkk: 1984: 243).

Perkembangan demikian tentunya mempengaruhi suasana politik di NIT terutama di Sulawesi Selatan, dan memberi dorongan besar kepada golongan unitaris untuk mewujudkan tujuannya yaitu membubarkan NIT. Selanjutnya desakan untuk mengadakan demonstrasi juga bertambah keras, sementara di Makassar terdapat kurang lebih 1500 orang atau 2 batalyon tentara *Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL)* yang sebagian besar berasal dari Ambon. Oleh Pemerintah NIT senantiasa mendesak kepada Kementerian Pertahanan di Jakarta, agar memasukkan mereka ke dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Namun ditolak, hanya satu kompi yang sudah berhasil masuk dalam APRIS dan ditempatkan dibawah komando Kapten Andi Azis (Agung, 1985: 726).

Meskipun hal tersebut diatas sudah ditentukan dalam persetujuan militer yang dicapai dalam KMB, namun Kementerian Pertahanan berharap dalam pasal 27 disebutkan bahwa akan diusahakan sedapat mungkin anggota-anggota pasukan tersebut dimasukkan

ke dalam APRIS sebagai kesatuan-kesatuan. Setelah Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX mengawatkan kepada Pemerintah NIT tanggal 23 Maret 1950, yang keputusannya bahwa dalam waktu singkat akan ditempatkan satu batalyon APRIS di Makassar. Pemerintah Menandakan bahwa penempatan pasukan APRIS di seluruh Indonesia adalah wewenang Menteri Pertahanan. Akan tetapi pemerintah NIT minta dengan sangat kepada Menteri Pertahanan agar penempatan pasukan APRIS di Makassar ditunggu sampai semua pasukan *KNIL* di masukkan kedalam APRIS. Maksudnya untuk menghindari bentrokan jika dua pasukan di Makassar yaitu APRIS dan *KNIL*, namun dibalik permintaan tersebut terselubung juga ada maksud lain (Arsip NIT, No. 97).²

Pemerintah NIT melihat adanya bahaya turut campur tentara APRIS dalam pergolakan tersebut, dimana oknum-oknum APRIS akan memberi angin kepada golongan unitaris dan kepada golongan ini mereka sangat bersimpati. Dengan demikian gerakan yang menghendaki dibubarkannya NIT dan memasukkannya kedalam negara Republik Indonesia akan mendapat bantuan yang sangat berharga, sehingga likuidasi NIT benar-benar terjadi. Memperhatikan perkembangan tersebut, anggota-anggota *KNIL* di Makassar yang belum dimasukkan kedalam tubuh APRIS mengadakan rapat tanggal 3 April 1950. Dalam rapat tersebut diambil keputusan bahwa mereka menentang kedatangan APRIS di Makassar, yang sangat aktif memprakarsai rapat tersebut adalah Mr. Dr. Ch.R.S Soumokil (mantan Menteri Kehakiman NIT) dan R.E.J.Matekohy (mantan Menteri Muda Keuangan NIT). Akan tetapi keputusan rapat anggota *KNIL* bertentangan dengan perintah Komandan Pasukan Belanda di Indonesia Timur dan Kalimantan, agar anggota *KNIL* tidak melibatkan diri dalam pertentangan masalah unitaris dan federalis (Anonim, 1953: 252).

Suasana di Kota Makassar semakin menghangat menjelang tibanya batalyon yang dipimpin oleh Mayor H.V.Worang, oleh sebab itu untuk meredakan suasana dilakukan usaha di kedua belah pihak yang diwakili Kapten Tahya dari *KNIL* dan Letkol A.J. Mokoginta dari APRIS (TNI). Selanjutnya Kapten Tahya melakukan pertemuan selama 6 jam dengan anggota-anggota *KNIL*, dan hasil yang dibicarakan memberikan pengharapan bahwa tidak akan menimbulkan masalah yang membahayakan pada saat pendaratan Batalyon Worang. *KNIL* akan memegang disiplin, adapun tentang masuknya *KNIL* ke APRIS akan melalui proses (Djarwadi, 1972: 48).

Pendaratan Batalyon Worang benar-benar akan dilakukan, oleh sebab itu ketika Andi Azis datang kerumah Soumokil untuk memberi tahu kepada Pemimpin-pemimpin *KNIL*, Andi Azis kemudian mengatakan apabila sikap Presiden demikian, maka ia tidak berdiri di belakang militer. Pendaratan Batalyon Worang tidak dapat dicegah lagi, saat Andi Azis hendak pulang, Soumokil berteriak "hantam saja". Bagi Andi Azis mengartikan kata itu dengan mengangkat senjata (Anonim, 1953: 285). Ditengah kekhawatiran atas NIT jika Batalyon Worang mendarat, maka Andi Azis segera melakukan aksinya

Kajian tentang peristiwa Andi Azis itu sangat menarik, karena pada periode ini negara sudah merdeka, akan tetapi pro kontra terhadap negara kesatuan terus bergulir. Kemudian terbentuk beberapa negara bagian oleh orang-orang yang menginginkan suatu negara federasi, salah satu orang Indonesia sejak awal menginginkan NIT ini adalah Andi Azis. Pihak pendukung republik jelas tidak menginginkan NIT, sehingga pertentangan tidak terelakkan. Bertolak dari uraian itu maka pokok persoalannya adalah sebagai berikut: apa yang melatarbelakangi sehingga terjadi peristiwa Andi Azis, bagaimana jalannya peristiwa Andi Azis, bagaimana Akhir dari peristiwa Andi Azis. Bertolak pada pokok permasalahan yang telah diurai sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: untuk mengetahui latar belakang dari peristiwa ini, untuk mengetahui peristiwa Andi

Azis, untuk mengetahui kesudahan dari peristiwa Andi Azis. Adapun Manfaat penelitian ini adalah sangat diharapkan dapat menambah bahan referensi serta memberi khasanah baru bagi historiografi Indonesia. Kemudian yang sangat penting adalah bermanfaat bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara, terutama di dalam membangun jati diri dan menggalang persatuan bangsa. Selain studi sejarah bukan hanya suatu dialog antara sejarawan dengan masa lalu, namun dapat menjadi renungan dan memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan dan menggambarkan tentang peristiwa Andi Azis, agar mendapatkan arah dan fokus yang jelas dalam penelitian, diperlukan pendekatan teori dari konsep-konsep ilmu sosial yang ada kaitannya dengan peristiwa ini. Seperti Lucian Pye mengatakan bahwa pemberontak pasti: punya cita-cita, punya cara pengerahan, dan indoktrin, punya organisasi dan punya kecenderungan dalam membuat keputusan dan aksi (Pye, tt: 1997: 16). Ted Robert Gurr mengatakan ada dua hal penting yaitu *value expectation* (nilai pengharapan) dan *value capabilities* (nilai kemampuan) yang menjadi alat pembanding seseorang atau kelompok dalam menilai dirinya dan kelompok lain (Gurr, 1970: 24). Sementara Neil Semester mengatakan komponen-komponen aksi terdiri atas: nilai-nilai, norma-norma, mobilisasi motivasi perseorangan untuk aksi yang teratur dalam peran-peran kolektif dan fasilitas situasional atau informasi, keterampilan, alat-alat dan rintangan dalam mencapai tujuan yang kongkrit (Smelser, 1971: 79).

Satu teori lain yang menyinggung tentang pemberontakan yaitu Samuel Stouffer, oleh Stouffer mengatakan moral mempunyai pengaruh yang besar terhadap efektivitas didalam pertempuran. Karena akan nampak di dalam diri seseorang adanya sifat agresif yang pada umumnya sifat agresif berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang yang disebut frustrasi. Artinya situasi yang dihadapi oleh individu, baik secara perseorangan maupun kemudian berkembang menjadi kelompok akan melahirkan hambatan terhadap tujuan yang hendak dicapai (Babbie, 1979: 445-446). Beberapa teori yang disebutkan diatas relevan dengan peristiwa ini, khususnya teori Lucian Pye yang mengatakan bahwa pemberontak punya cita-cita, punya pengerahan dan indoktrin serta cenderung membuat keputusan dan aksi. Dari beberapa teori di atas dapat difahami bagaimana karakter dari Andi Azis, seperti Andi Azis sangat menginginkan posisi sebagai panglima perang di APRIS, oleh karena itu saat mendapat hambatan, maka Andi Azis memutuskan untuk melakukan aksi.

Penelitian ini didukung oleh karya-karya terdahulu, perlunya menampilkan karya terdahulu agar dapat diketahui kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Karya-karya tersebut antara lain: tulisan dari Mayor Bardosono (1955), yaitu peristiwa Sulawesi Selatan 1950, karya ini merupakan salah satu sumber yang amat membantu, karena membahas tentang seputar peristiwa Sulawesi Selatan di tahun 1950 termasuk peristiwa Andi Azis sampai pembelaan Andi Azis di pengadilan militer. Salah satu karya yang dapat diperoleh sejumlah data tentang peristiwa Andi Azis adalah Sulawesi dan Pahlawan-pahlawannya oleh Patang Lahadji (1976), tulisan ini membahas sejumlah peristiwa di Sulawesi Selatan dari sebelum kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan dan juga mengingatkan beberapa tokoh-tokoh Sulawesi termasuk Andi Azis. Buku yang juga membahas tentang peristiwa Andi Azis adalah dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat yang ditulis oleh Ide Anak Agung Gde Agung (1985), dalam buku ini banyak menyinggung tentang NIT dari awal terbentuknya hingga tentang Kabinet-kabinet yang ada di NIT. Salah satu buku yang sangat membantu adalah Penumpasan Separatisme Di Indonesia (1978) dari Dinas Sejarah TNI AD, dalam tulisan ini juga memberikan beberapa data tentang peristiwa ini.

Karya lain yang memberi pencerahan dalam tulisan ini adalah Naskah Sejarah Corps Hasanuddin Prajurit Tempur dan Pembangunan yang ditulis oleh Radik Djarwadi, dkk, dalam buku ini amat kental di ulas peran TNI, jadi selain pendaratan oleh TNI juga jalannya peristiwa Andi Azis. Kemudian sumber lain yang dirujuk adalah Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Sulawesi Selatan 1945-1950, oleh Harun Kadir, dkk (1984). Beberapa karya tulis tersebut diatas pada umunya mengulas masalah peristiwa Andi Azis, dan sangat membantu data tulisan ini selain yang telah disebutkan tentunya masih ada beberapa sumber yang dapat melengkapi tulisan ini yang dianggap sesuai dan ada relevansinya.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode, yaitu metode sejarah, tujuannya agar penelitian ini lebih akurat. Adapun metode yang digunakan dengan melalui empat tahap antara lain: Heuristik (pengumpulan data), adapun teknik yang digunakan ditempuh dua cara yakni: Wawancara, yang dilakukan oleh penulis adalah mewawancarai tokoh atau orang-orang yang memiliki pengetahuan yang terkait dengan masalah Andi Azis, yaitu H. Andi Odang dan H. Abd. Razak Djalle. Sedangkan studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data yang bersumber pada bacaan-bacaan yang meliputi: buku-buku, makalah-makalah, arsip dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian kedua kritik, yaitu intern dan ekstern. Hal ini dilakukan karena tidak semua data yang didapatkan, dapat jaminan kebenaran keobjektifannya, sehingga bisa menambah atau mengurangi keabsahan data. Untuk mengolah data menjadi fakta diperlukan kritik sejarah, tujuan kritik keseluruhannya adalah untuk menyelidiki data menjadi fakta. Dengan demikian fakta adalah data yang sudah lulus diuji dengan kritik berdasarkan hukum-hukum metode sejarah. Ketiga interpretasi atau penafsiran, setelah melalui kritik sumber. Fakta-fakta yang didapatkan itu kemudian diinterpretasikan atau penyajian adalah untuk memberikan arti atau makna kepada suatu peristiwa/penafsiran dilakukan dengan jalan memberi penjelasan terhadap fakta-fakta sejarah seobyektif mungkin. Keempat penulisan (historiography), penulisan merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian proses pengolahan dan penyusunan suatu tulisan.

PEMBAHASAN

Mengenal Andi Azis

Untuk memahami latar belakang terjadinya peristiwa Andi Azis, maka perlu diketahui bagaimana riwayat hidup Andi Abdul Azis, lebih familiar disebut Andi Azis. Siapa dia sebenarnya dan bagaimana kondisi lingkungannya, kehidupan keluarganya, pendidikan dan lain-lain. Karena keadaan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi seseorang. Lingkungan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kepribadian anak, khususnya lingkungan keluarga. Kedua orang tua adalah pemain peran ini, lingkungan keluarga adalah basis awal kehidupan bagi setiap manusia. Dengan kata lain kepribadian anak tergantung pada pemikiran dan perlakuan kedua orang tua dan lingkungan (Said, 2007: 5).

Andi Azis dilahirkan di Simpangbinanga, Kabupaten Barru Sulawesi Selatan tanggal 19 September 1924. Ayahnya bernama Andi Djuanna Daeng Maliungan, ibunya bernama Becce Pesse, ia anak pertama dari 11 bersaudara. Ia masuk sekolah ELS kemudian ikut ke negeri Belanda dengan seorang asisten residen pensiunan bangsa Belanda, sehingga praktis sejak berumur 9 tahun ia sudah hidup di negeri Belanda. Pada tahun 1935 di negeri Belanda ia memasuki La Gere School pada sekolah menengah Lyseum

sampai tahun 1944. Andi Azis sebenarnya sangat berhasrat untuk memasuki dunia militer di Belanda untuk menjadi seorang perwira, tetapi niatnya tidak terlaksana karena berkecukunya perang dunia II. Setelah itu ia menjadi anggota *Koninklijke Leger (KL)* dan bertugas sebagai anggota team perlawanan bawah tanah melawan Jerman. Tanggal 17 September 1944 Andi Azis dipindahkan tugaskan menjadi anggota mata-mata sekutu di Jerman. Namun Sekutu mengalami kekalahan-kekalahan hebat di Eropa, sehingga kegiatan mata-mata ini tidak berjalan. Andi Azis dengan kelompoknya dengan diam-diam menyeberang Sungai Rhein terus menyeberang ke Inggris, daerah sekutu yang tidak begitu gawat dibandingkan dengan negara sekutu lainnya di Eropa. Di Inggris kemudian ia mengikuti latihan pasukan komando atau pasukan khusus *special Troop (SP)*, di sebuah kamp kurang lebih 70 km di luar London. Dari pendidikan ini ia berhasil lulus dengan pujian, sesudah latihan tersebut kemudian mengikuti pendidikan militer di Inggris (semacam SECABA) dan menjadi sersan tahun 1945. Pada bulan Agustus 1945 karena SEAC dalam usaha mengalahkan Jepang di timur memerlukan seorang anggota tentara pasukan komando atau pasukan khusus yang dapat berbahasa Indonesia. Kemudian Andi Azis ditempatkan di komando perang Sekutu di India, dan berpindah-pindah tugas di Colombo dan akhirnya Calcuta dengan pangkat sersan. (Anonim, 1978: 5; Lahadjji, 1976: 143).

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kepada Andi Azis diperbolehkan memilih tugas apakah akan ikut satuan-satuan Sekutu yang akan bertugas ke Jepang atautkah akan bertugas di gugusan selatan (Indonesia). Bagi Andi Azis yang sudah 11 tahun tidak pernah bertemu dengan orang tua, ia memilih bertugas di Indonesia, dengan harapan dapat sekali waktu mengunjungi orang tuanya di Makassar. Dengan jabatan komandan regu di satuan yang diikuti tanggal 19-1-1946 ia mendarat di Jawa (Jakarta), kemudian ia bertugas di daerah Cilincing. Pada tahun 1947 mengambil cuti panjang ke Makassar, ia agak lama di Makassar. Pada tahun itu juga ia mengikuti kursus kepolisian di Menteng Pulo Jakarta, tapi pertengahan tahun 1947 ia dipanggil lagi masuk *KNIL* dan diberi pangkat letnan dua.

Masih tahun 1947 Andi Azis menjadi ajudan senior Sukowati, Presiden NIT, karena Sukowati berkeinginan mempunyai seorang ajudan berdarah Bugis. Jabatan ajudan dijalannya selama satu setengah tahun, kemudian ia ditugaskan sebagai instruktur di Bandung (Cimahi) pada pasukan S.S.O,P (Baret Merah-*KNIL* 1948). Pada akhir 1948 ia dikirim ke Makassar dan diangkat menjadi komandan kompi dengan pangkat Letnan Satu, dengan 125 orang anak buah *KNIL* yang berpengalaman dan kemudian menjadi TNI. Dalam susunan APRIS ia dinaikkan pangkatnya menjadi kapten dan tetap memegang kompi tanpa banyak mengalami perubahan personil. (Anonim, 1978: 8).

Demikian latar belakang kehidupan Andi Azis yang sebagian besar pembentukan jiwanya dialaminya di negeri Belanda. Latar belakang lingkungan kehidupan Belanda sejak kecil, kemudian mempengaruhi pandangan hidupnya. Menurut pendapatnya, ia sangat percaya janji Ratu Yuliana Wilhelmina bahwa Indonesia akan memperoleh kemerdekaannya tanggal 17 November 1942 (November Belofte-janji November) sebagai hadiah dari negeri Belanda. Ternyata walaupun janji November ini kemudian tidak terlaksana sama sekali, Andi Azis masih mempunyai pendapat bahwa kemerdekaan itu akan lebih baik didapat dengan evolusi tidak dengan revolusi. Tentu saja hal ini bertentangan dengan kenyataan aspirasi rakyat Indonesia yang memang hanya mempunyai tekad merdeka atau mati. Dengan pola cara berfikir itu, tidak heran ia memihak pandangan federalis dan bukan unitaris. Menurut pendapatnya ide membubarkan negara-negara federal, termasuk NIT yang dicintai adalah tidak tepat, tetapi kesatuan Indonesia dapat dicapai secara perlahan-lahan.

Situasi Politik Menjelang Peristiwa Andi Azis

Banyak kesulitan yang dihadapi sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, terutama usaha-usaha Belanda untuk kembali menjajah Indonesia dengan strategi lamanya *divide et impera*. Di bidang militer banyak usaha untuk memperlemahkan proklamasi yang telah diraih, misalnya dengan mengadakan siasat berunding sehingga menghasilkan situasi terjepit bagi TNI. Seperti dengan adanya perjanjian Linggar Jati dan Renville, dipandang dari sudut militer perundingan-perundingan tersebut berarti memberikan kesempatan konsolidasi kepada Belanda. Dan menetralkan kedudukan TNI yang telah dapat menduduki posisi-posisi yang sangat menyulitkan Belanda. Van Mook sebagai pimpinan Belanda semasa sebelum pengakuan kedaulatan berusaha menghimpun unsur-unsur yang masih dapat dirangkunnya, untuk memecah belah Indonesia dengan idenya membentuk negara-negara bagian federasi. Tentang pembentukan negara federal mulai dirintisnya pada Konferensi Malino, tanggal 15-25 Juli 1946 dengan dihadiri oleh oknum-oknum daerah yang berhasil dipengaruhi kembali terutama Indonesia Timur (Wawancara Andi Oddang, tgl 19 Februari 2008).

Dari konferensi-konferensi ini lahir pertama kali NIT pada bulan Desember 1946 meliputi pulau-pulau Sunda kecil, Sulawesi dan Maluku. Selanjutnya berturut-turut dengan pembentukan negara Sumatera Timur (1947) Madura (1948), Pasundan (1948), Sumatera Selatan (1948) dan Jawa Timur (1948). Dalam kondisi yang terjepit negara kesatuan masih dapat memperjuangkan diadakannya KMB, antara pemerintah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Wakil-wakil negara federal yang telah berhasil dibentuk Van Mook pada tanggal 23 Agustus-2 Nopember 1949 di Den Haag yang melahirkan pengakuan kedaulatan. Meskipun pada dasarnya masih kurang, yaitu dengan adanya bentuk RIS dan pengaruh ke cita-cita Uni Indonesia Belanda (Agung, 1985: 614).

Dengan resminya terbentuk RIS, maka seluruh Indonesia terdiri dari 16 negara bagian. Negara-negara tersebut yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Kenegaraan Dayak Besar, Kesatuan Kenegaraan Kalimantan Tenggara, Satuan Kenegaraan Riau, Satuan Kenegaraan Daerah Banjar, Satuan Kenegaraan Kalimantan Timur, Satuan Kenegaraan Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan Satuan Kenegaraan Jawa Tengah. Pihak-pihak yang menganut federasi mendapat angin, cita-cita negara kesatuan ternyata cepat tercapai dengan kesadaran dan kemauan yang keras bangsa kita sendiri untuk tidak mempertahankan lebih lama produk KMB. Dalam Kasus NIT ini sebenarnya tidak seluruhnya hanya sebahagian tokoh-tokoh saja yang menghendaki berdirinya NIT (Anonim, 1978: 12). Andi Azis turut sependapat di mana rupanya telah tercapai persetujuan pendapat antara Andi Azis dengan Soumokil, bahwa kelak dalam NIT Soumokil adalah tokoh politik, sedangkan ia sendiri adalah tokoh militer atau panglimanya.

Andi Azis secara politik termasuk kelompok yang tetap ingin mempertahankan federalisme, ia mengharap mendapat kedudukan pucuk pimpinan militer dalam bentuk federalisme. Dalam NIT, yakni Soumokil sebagai tokoh politik dan Sukowati sebagai presiden. Hal ini dapat dipahami mengingat disamping latar belakang bentuk pribadi Andi Azis yang dibesarkan dalam lingkungan Belanda, dengan berkat didikan penjajahan pada umumnya maka ia tetap ingin dengan bentuk federalis tersebut, sesuai dengan paham feodalis yang dianut oleh sebagian kaum bangsawan.

Pada tanggal 16 Maret 1950 bermunculan partai politik dan organisasi kemasyarakatan beserta massanya di Lapangan Karebosi Makassar, mereka berkumpul untuk melakukan persiapan demonstrasi keesokan harinya untuk berjuang membubarkan

NIT. Tanggal 17 Maret 1950 sekitar 2000 orang yang dikoordinasikan oleh BPRRI dan GAPKI turun ke jalan dan mengadakan demonstrasi besar-besaran secara tertib di Kota Makassar. Mereka berkeliling kota sejak pagi dan demonstrasi itu diakhiri di Gedung BPR, sepanjang perjalanan mereka meneriakkan bubarkan NIT dan lebur NIT dalam Republik Indonesia. Sampai di Gedung BPR sebuah resolusi diserahkan kepada ketua BPR, yang mendesak agar NIT dibubarkan dan dimasukkan ke dalam Republik Indonesia (Poelinggomang, dkk, 2005: 266). Pada tanggal 20 maret 1950 demonstrasi kembali berlangsung, rapat umum diadakan sebelum keliling kota, dibacakan mosi bahwa NIT segera dibubarkan dan Sulawesi Selatan menjadi bagian Republik Indonesia. Mereka juga menuntut segera diwujudkan negara kesatuan, selain di Kota Makassar terjadi juga demonstrasi di ParePare, Rappang, Enrekang, Palopo, Tanah Toraja, Pinrang, Mandar, Gowa, Limbung, Takalar, dan lain-lain (Poelinggomang, dkk, 2005: 266).

Untuk mengimbangi demonstrasi yang telah diselenggarakan pada 17 Maret 1950, dari pihak golongan federalis hendak mengadakan juga demonstrasi pada 26 Maret 1950. Sebagai suatu unjuk perasaan dari kalangan federalis, bahwa mereka ingin mempertahankan prinsip federalisme dan NIT. Akan tetapi semalam sebelum demonstrasi dilaksanakan, oleh sementara golongan diadakan semacam intimidasi terhadap beberapa tokoh federalis, seperti Andi Massarapi. Oleh kelompok tersebut dilemparkan granat ke rumahnya, selain itu oleh beberapa kelompok ditembakkan senjata api di beberapa tempat di Makassar (Agung, 1985: 722).

Perkembangan selanjutnya pada akhir Maret ditetapkan lagi suatu keputusan Presiden RIS yang menyatakan bahwa Negara Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur dibubarkan dan keduanya dimasukkan ke dalam Negara Republik Indonesia. Pada bulan April 1950 Keputusan Presiden yang sama dikeluarkan lagi, bertujuan membubarkan daerah Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Bangka, Riau, dan Belitung kemudian menggabungkan daerah-daerah itu ke dalam Negara Republik Indonesia. Sampai pada 4 April 1950 RIS hanya terdiri dari bagian Negara Republik Indonesia, telah termasuk semua negara-negara dan daerah daerah yang telah dibubarkan NIT, Negara Sumatera Timur, daerah Istimewa Kalimantan Barat. Kurang lebih seminggu kemudian daerah Kalimantan Barat juga dibubarkan dan dimasukkan ke dalam Negara Republik Indonesia. Setelah kepalah daerahnya Sultan Hamid II ditahan, karena terlibat dalam peristiwa Westerling-APRA di Bandung (Agung, 1985: 723).³

Nampaknya ketegangan timbul dalam Parlemen dan meruncingnya suasana di kalangan masyarakat, telah menjerumuskan NIT pada krisis politik yang hebat dan bergejolak pada 5 April 1950. Ini merupakan suatu musibah politik yang menjadi sebab jatuhnya Kabinet Diapari, bubarnya NIT, dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Agung, 1985: 723).

Parlemen NIT, Fraksi Kesatuan yang diketuai oleh Lanto Daeng Pasewang mengajukan mosi membubarkan NIT, sehingga menimbulkan perdebatan yang seru. Dengan secara spontan rakyat di Sulawesi Selatan mendukung mosi Fraksi Kesatuan. Kemudian Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia (BPRRI) yang menggerakkan kekuatan kaum republiken untuk membubarkan NIT, mengadakan demonstrasi bekerjasama dengan partai-partai dan organisasi yang berada di Makassar. Untuk melaporkan keadaan di Makassar, maka diutus ke Yogyakarta (sebagai ibukota), menghadap Pemerintah RI yaitu Makaraeng Daeng Manjarungi dan Riri Amin Daud (Djarwadi, 1972: 46).⁴

Meningkatnya tuntutan terhadap pembubaran NIT, menyebabkan pemerintah NIT mencoba mencari dalangnya. Menjelang akhir Maret 1950 penangkapan terjadi di mana-mana, sebagian besar yang dicari adalah aktivis BPRRI seperti Yusuf Bauty dan F.

Pondaag. Di samping ada penangkapan oleh polisi terhadap aktivitas BPRRI. Sebaliknya rumah orang-orang pro Belanda atau yang ingin mempertahankan NIT seperti Andi Mas-sarapi, Baso Daeng Malewa, dan sebagainya dilempari batu atau granat tangan. Suasana tersebut membuat Kabinet NIT di bawah Perdana Menteri Diapari menjadi gugup, karena penangkapan yang dilakukan justru memancing kekerasan baru (Poelinggomang, dkk, 2005: 266).

Perjuangan yang sama juga dilakukan oleh pemimpin-pemimpin lokal dari kalangan aristokrat atau kaum bangsawan di Sulawesi Selatan yang tidak ingin memperoleh kedaulatan dalam bentuk negara federal. Mereka berusaha lewat pemerintah RI yang berada di Yogyakarta agar membubarkan NIT. Untuk mewujudkan itu berangkat ke Yogyakarta sejumlah pimpinan dari kalangan aristokrat pro republik pada akhir Maret 1950 seperti Andi Mappanyukki (mantan Raja Bone), Andi Jemma (mantan Datu Luwu), Pajonga daeng Ngalle (mantan Karaeng Polombangkeng), Andi Sultan Daeng Raja (mantan Karaeng Gantarang), dan lain-lain. Rombongan tersebut di bawah pimpinan Lanto Daeng Pasewang, disertai Kapten M. Yusuf, dan Letnan Bing Latumahina dari KMTIT (Poelinggomang, dkk, 2005: 267).

Situasi kemiliteran di Indonesia Timur dijelaskan sebagai berikut sesuai dengan hasil KMB, maka *KNIL* itu dimasukkan kedalam TNI. Terutama bagi *KNIL* asal bangsa Indonesia, dengan melalui prosedur administratif yang cukup berbelit. Tentu saja mengalami banyak persoalan-persoalan psikologis mengingat mereka dilebur ke dalam TNI yang katakanlah selama berdiri pada pihak yang berbeda kepentingannya. *KNIL* untuk kepentingan Belanda, TNI yang semula memang berasal dari segala lapisan dan golongan yang spontan memperjuangkan kemerdekaan dengan semangat tidak kenal pamrih. Masalah psikologis akan lebih terasa oleh pihak *KNIL* termasuk pasukannya Andi Azis, sehingga kemudian banyak menimbulkan kegelisahan seperti keraguan apakah benar akan diterima dalam TNI, apakah akan diturunkan pangkatnya demikian rendah.

Apalagi mengingat situasi administratif yang masih ruwet saat itu, kegelisahan inilah yang sebagian besar ditanggung kepentingan politik kaum federalis untuk memberontak kepada RIS. Dimana dalam NIT unsur-unsur seperti ini memang masih kuat sekali dan sengaja diatur oleh Belanda yang ingin tetap mengembalikan pengaruhnya di Indonesia. Setidak-tidaknya ingin menciptakan kondisi-kondisi yang mana Belanda tetap mengendalikan Indonesia, dengan menghasut bangsa Indonesia yang dapat dipengaruhinya seperti Soumokil dan kawan-kawan.

Usaha-usaha Belanda di bidang militer kelihatan juga, seperti dengan memusatkan pasukan-pasukan *KNIL* di Indonesia Timur. TNI di daerah ini belum mempunyai kekuatan pengamanan yang berarti, tidak seperti halnya di Jawa dan Sumatera. Bagi pihak-pihak yang menginginkan Republik Indonesia bersatu yang lazim disebut golongan unitaris, saat itu menyatu di jiwa rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi. Sebaliknya upaya Belanda untuk kembali di Indonesia Timur melalui tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang dapat dipengaruhinya, karena mempunyai latar belakang kehidupan Eropa yang mendalam.

Reaksi dari golongan unitaris terlihat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Selatan (DPRSS) pada bulan Desember 1949, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh A. Ras-yid Faqih, Haji Mattewakkang Daeng Raya, dan A. Karim Mamangka mengajukan mosi mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, agar supaya didatangkan pasukan TNI guna menjaga keamanan di daerah Sulawesi Selatan. Mosi ini mendapat tantangan dari golongan federalis menginginkan pasukan-pasukan bekas *KNIL* yang telah berada di Indonesia Timur, untuk tetap menjaga keamanan atas nama APRIS.

Golongan ini diawali oleh Andi Massarapi dan kawan-kawan, di mana telah mengadakan pemungutan suara, ternyata sesuai dengan aspirasi rakyat kita, hasilnya golongan unitaris menang. Sehingga disampaikan kepada pemerintah RIS di Jakarta untuk mengirimkan pasukan TNI ke Indonesia Timur, maksudnya adalah untuk mengamankan Makassar. Mosi ini disampaikan kepada Menteri Pertahanan Hamengkubuwono tanggal 23 Desember 1949 (Agung, 1985: 721).

Dalam jabatannya Hamengkubuwono didampingi A.H. Nasution berkeliling ke seluruh ibukota negara bagian RIS, untuk menempatkan seorang panglima dari TNI sebagai gubernur militer yang bertanggung jawab di bidang keamanan dan untuk menerima kekuatan Territorial dari tangan Belanda. Hanya di ibukota NIT usaha menempatkan seorang panglima menemui kegagalan, karena Kabinet NIT mempunyai rencana tertentu. Akhirnya dicapai suatu kompromi dengan diadakan suatu Komisi Militer Territorial Indonesia Timur (MTIT), untuk mengatur konsolidasi APRIS (Djarwadi, 1972: 43).

KMTIT ini terdiri dari Ir. Putuhena Menteri Pekerjaan Umum sebagai ketua, Letkol A.J. Mokoginta dari TNI sebagai anggota, dan Mayor Nanlohy dari *KNIL* sebagai anggota. Yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah keamanan di Indonesia Timur termasuk penampungan *KNIL* yang akan menjadi anggota TNI dengan segala prosedur dan kebijaksanaannya (Djarwadi, 1972: 43).

Sebagai gerakan imbalan tanggal 3 April 1950 panitia pembentukan peralihan *KNIL* ke APRIS yang diketuai oleh seorang pensiunan Sersan Mayor *KNIL* Christofe telah mengadakan rapat di Makassar dan telah mengeluarkan pernyataan sikap Mendesak pimpinan *KNIL* dan APRIS di Jakarta supaya sisa *KNIL* di Makassar secepat mungkin dimasukkan ke dalam APRIS, mendesak pimpinan NIT supaya pengiriman APRIS ke Makassar ditunda dulu, mendesak pemerintah NIT mencegah kedatangan pasukan APRIS di Makassar (Djarwadi, 1972: 47).

Oleh karena itu tanggal 4 April 1950 setelah beberapa rapat sebelumnya yang dilakukan oleh anggota *KNIL* bertempat di Bioskop Alhambra dan ditempat-tempat lainnya, mengeluarkan mosi penolakan atas pengiriman pasukan APRIS bekas TNI oleh Pemerintah RIS. Sejumlah 300 orang anggota *KNIL* dan polisi yang dipimpin oleh Hitepoo, Lilipaly, dan lain-lain, mengadakan pertemuan di kediaman Soumokil yang dihadiri juga Andi Azis. Topik pembicaraan rencana melakukan tindakan pencegahan kehadiran Batalyon Worang yang mendarat besok dengan menggunakan Kapal Wikelo dan Bonteku (Kadir, dkk, 1984: 235).

Presiden NIT Sukowati yang hadir juga pada pertemuan itu turut memberikan pengarahan, agar mereka tetap tenang dan tidak mengambil tindakan-tindakan yang tidak pantas. Petunjuk dan nasehat itu diterima oleh hadirin, akan tetapi setelah Sukowati meninggalkan pertemuan, tampil Soumokil yang berusaha mendorong dan menghasut. Menurut Soumokil agar perlu dilaksanakan tindakan pencegahan pendaratan Batalyon Worang, karena keadaan semakin hangat. Dengan hasutan Soumokil, maka Andi Azis bersedia melakukan rencana yang dicanangkan oleh Soumokil (Bagi Andi Azis dinyatakan sebagai taktik yang ditempuh untuk dapat menguasai anggota *KNIL*, ia sudah terpancing oleh hasutan Soumokil) agar tidak terjadi pertumpahan darah yang hebat (Kadir, dkk, 1984: 238).

Suasana di kalangan militer menjelang tanggal 5 April 1950 hangat sekali, baik oleh terjadinya Angkatan Perang (APRA) di Jawa Barat yang memakan cukup banyak korban, apalagi saat tibanya pendaratan Batalyon Worang di Makassar. Untuk meredakan keadaan dilakukan usaha oleh kedua belah pihak yaitu oleh Kapten Tahya dari *KNIL* dan Letkol A.J. Mokoginta dari APRIS/TNI. Kapten Tahya telah melakukan pem-

bicaraan-pembicaraan selama 6 jam dengan anggota-anggota *KNIL*. Hasil pembicaraan memberikan pengharapan untuk adanya saling pengertian serta tidak menimbulkan persoalan yang membahayakan. Kapten Tahya telah melaporkan pada Pemerintah NIT, bahwa apabila Batalyon Worang mendarat tidak akan terjadi apa-apa. *KNIL* tetap memegang disiplin akan dimasukkan ke APRIS dengan melalui proses yang ditentukan oleh pucuk pimpinan APRIS dan *KNIL* (Djarwadi, 1972: 47).

Berbeda dengan laporan Kapten Tahya, Pemerintah NIT, tanggal 4 April 1950 jam 13.15 telah mengeluarkan pengumuman, bahwa kedatangan tentara APRIS ke Indonesia Timur, pemerintah dihadapkan dengan suatu *fait accompli*. Meskipun demikian, pemerintah akan berikhtiar agar saat kedatangan Batalyon Worang tidak akan menimbulkan kesulitan. Karenanya pengumuman kemarin oleh Kementrian Penerangan di Makassar, bahwa kedatangan APRIS di Indonesia Timur diterima dengan gembira tiada benarnya adanya. Memang sehari sebelumnya Menteri Penerangan NIT Dr. Ratulangi menyatakan bahwa kedatangan APRIS diterima dengan gembira, sedangkan Soumokil menyatakan kepada pers, bahwa cepat atau lambat reorganisas *KNIL* adalah menjadi tanggung jawab pihak Belanda. Soumokil dikenal sebagai seorang yang memihak Belanda, kedudukan Soumokil mulai tersisih setelah ia digantikan oleh R. Claproth (Kadir, 1984: 243; Poelinggomang, dkk, 2005: 268).

Sementara itu pihak TNI selama masa-masa ini Letkol A.J. Mokoginta melakukan kegiatan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin-pemimpin partai, organisasi, dan pers. Tujuannya untuk memberikan penjelasan arti dan tugas kedatangan APRIS khususnya Batalyon Worang, dijelaskan bahwa APRIS tidak mencampuri aliran-aliran politik yang ada. Dalam pertemuan tersebut tidak seorangpun pejabat Pemerintah NIT yang hadir, sekalipun mereka mendapat undangan (Djarwadi, 1972: 48).

Tindakan militer Andi Azis sebenarnya berpangkal pada rencana pengiriman tambahan pasukan APRIS dari Jawa ke Makassar. Menurut rencana semula, peleburan bekas *KNIL* menjadi anggota APRIS ternyata tidak dilaksanakan secepat mungkin. Hanya satu unit pasukan *KNIL* di bawah pimpinan Letnan Andi Azis yang dilantik tanggal 30 Maret 1950, pangkatnya dinaikkan menjadi kapten (Kadir, dkk. 1984: 234), sedangkan pasukan *KNIL* lainnya belum dilebur menjadi APRIS. Sebagaimana diketahui Sulawesi Selatan merupakan daerah pemusatan pasukan *KNIL*, karena Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah yang perlawanannya begitu hebat oleh Belanda.⁵

Oleh pasukan *KNIL* setempat, terutama Andi Azis dengan kedatangan pasukan ditolak dengan alasan toh mereka juga sudah TNI, untuk apa didatangkan TNI dari Jawa. Namun sebenarnya alasan ini tidaklah demikian saja, sebab sebenarnya telah dipolitikkan sedemikian rupa untuk tetap mempertahankan kepentingan federalis. Di mana Belanda mempunyai banyak kepentingan, alasan-alasan ini banyak dikemukakan.

Jalannya Peristiwa

Kasus khusus yang menyebabkan aksi Andi Azis, adalah dengan dikirimnya pasukan lengkap dengan persenjataannya di Makassar. Menurut Andi Azis penolakannya ini sudah keempat kalinya melalui Presiden NIT Sukowati kemudian diteruskan ke Letkol A.J. Mokoginta untuk diteruskan lagi ke Presiden Sukarno. Sebelum Batalyon Worang mendarat ia telah mengadakan gerakan pendudukan, dengan tanpa diduga-duga. Pada pagi buta, pukul 06.00 WITA, tanggal 5 April 1950 Andi Azis mengadakan gerakan untuk melumpuhkan kekuatan bersenjata APRIS. Andi Azis disertai kompiunya dan dibantu kurang lebih 1300 orang *KNIL* praktis telah menguasai Kota Makassar.

Sasaran gerakan Andi Azisi adalah:1. menduduki semua stasion radio dan teleko-

munikasi, 2. menduduki lapangan terbang Mandai, 3. memblokade pelabuhan Makassar dan memasang meriam-meriam di pantai, kemudian mengancam kapal yang ditumpangi Batalyon Worang akan ditembak jika berani merapat di pelabuhan (kapal yang lain dengan membawa 300 pejuang bersenjata dari Bali dibawah pengawalan Lettu PM Moulwi Saellan yang sedianya akan ditempatkan di Pandang Pandang juga tidak jadi mendarat, 4. Menyerang staf Kwartier KMTIT di Jalan Guntur (sekarang Sungai tangka), di mana ditempatkan dua peleton pasukan Polisi Militer dipimpin Letda Tobing, 5. Menyerang Mess perwira Tinggi di jalan Guntur 39 (sekarang Sungai Tangka 39) adalah juga tempat tinggal Letkol A.J. Mokoginta, 6. Menyerang Mess Perwira Menengah di Jalan Mongisidi d/h Klaapperlaan, 7. Menyerang Asrama Pejuang Bersenjata RI yang sedang dalam latihan di Pandang Pandang Sungguminasa (Djarwadi, 1972: 48)

Terutama yang menjadi sasaran adalah markas KMTIT di Jalan H. Guntur, Asrama Corps Polisi Militaer (CPM) dan mess Perwira TNI di Jalan Mongisidi berhasil dilumpuhkan. Selain menguasai markas militer Andi Azis melakukan penangkapan terhadap Letkol A.J. Mokoginta (komandan APRIS untuk wilayah Indonesia Timur) beserta beberapa stafnya (Djarwadi, 1972: 49; Arsip Pemda Tanah Toraja, No. 802).

Pada saat ingin menahan Letkol A.J. Mokoginta, Andi Azis diperingatkan bahwa itu adalah insubordinasi yang di jawabnya *Met spijt me, Overste, maar ik moethet doen* (saya menyesal *overste*, tetapi saya terpaksa bertindak demikian) (Wawancara Abd. Razak Djalle, 20 Februari 2008).⁶

Operasi terhadap staf kwartier dan Mess Perwira Tinggi di Jalan Sungai Tangka tidak menemui kesulitan, karena lebih dahulu Andi Azis telah mengirim anak buahnya masuk ke dalam staf kwartier, begitu juga di Mess Perwira Tinggi. Selanjutnya operasi mereka terhadap Markas KMTIT dan Mess Perwira di Jalan Guntur dan Jalan Mongonsidi tidak mengalami kesulitan karena Andi Azis telah mengirim anak buahnya kedalam Markas KMTIT. Dengan alasan memperkuat penjagaan malam itu, karena dikhawatirkan terjadi insiden antara APRIS dan *KNIL* Ketika gerakan dimulai, anggota Kompi Andi Azis mengancam dari dalam pengawal-pengawal CPM. Mereka mengepung dan menduduki markas KMTIT dan mess perwira Tinggi pada jam 6 pagi. Sedangkan di mess perwira menengah di Jalan Mongonsidi dilakukan pendudukan dengan dua kendaraan panser, sehingga seluruh perwira tidak diberi kesempatan melawan (Djarwadi, 1972: 49).

Pasukan Andi Azis dengan mendapat bantuan dari Kaveleri menuju Pandang-pandang Sungguminasa menghadapi perlawanan, karena sejak jam 5 pagi seluruh pasukan yang berjumlah 340 orang itu sudah apel pagi. Lettu Andi Sapada dan Letda Surya pengawal empat orang pagi, harus bertugas dalam upacara penyambutan Batalyon Worang. Sebelum berangkat ke Makassar telah memberikan perintah-perintah meniadakan latihan pagi dan semua anggota dalam keadaan waspada. Pimpinan dipercayakan kepada Letnan Muda Andi Hasanuddin Oddang dan dibantu oleh Lappase pimpinan rombongan dari Palopo, Frans Sangker pimpinan rombongan dari Minahasa, dan Serma M. Arsyad B anggota TNI yang diperbantukan di Pandang Pandang (Anonim, tt: 11-12; Djarwadi, 1972: 49).

Dalam peristiwa tersebut terjadi dua kali *vuur contact*, pertama dengan rombongan Lettu Andi Sapada yang mengendarai jeep ke Makassar, setibanya di Mess Perwira di Jalan Mongisidi d/h klapper laan telah ditahan oleh pasukan Andi Azis telah menguasai jalan tersebut dengan jarak 20 m, sehingga terjadilah tembak-menembak jarak dekat. Pada saat itu Letda Surya luka ditangan, dua orang pengawalnya gugur. Di pihak lawan gugur satu orang. Sedangkan Lettu Andi Sapada, Letda Surya dan rombongan dapat meloloskan diri, kemudian kembali ke pangkalan dan bergabung dengan pasukan di Pandang

Pandang. Kedua, tepat jam 6.30 pagi, pasukan Andi Azis sudah menuju Asrama. Dari depan pada mulanya mereka bermaksud melakukan gerak tipu dengan memberdayakan penjaga pintu dengan mengatakan mereka ditugaskan memperkuat pertahanan. Tetapi karena kewaspadaan penjaga pintu mereka tetapi tidak diperbolehkan masuk, sehingga terjadilah tembak menembak antara penjaga pintu dengan penyerang. Peristiwa itu memberikan peluang kesegenap anggota yang berada dalam asrama, segera mengambil senjata serta menempati posisi-posisi taktis dalam parit-parit yang memang sudah disiapkan beberapa hari sebelumnya sepanjang pagar bambu depan asrama. Penempatan pada posisi yang menguasai medan memungkinkan pasukan Lettu Andi Sapada mengadakan perlawanan selama dua jam terhadap serangan lawan yang diperkuat dengan dua panser (Djarwadi, 1972: 49).

Di pihak pasukan TNI ada penambahan dua pucuk senapan mesin yang baru, setelah ditambah dua pucuk senapan malah pasukan TNI menyerang pasukan Andi Azis, akhirnya pasukan Andi Azis mundur. Peristiwa baku tembak ini menelan korban lima orang di pihak pasukan Andi Azis, pada pukul 10.00 WITA seluruh Makassar dikuasai Andi Azis (Anonim, 1991: 309; Djarwadi, 1972: 50).

Pasukan Andi Azis yang menempati medan di sebelah jalan raya dapat dipukul mundur, setelah kekuatan tembak pasukan Lettu Andi Sapada ditambah dengan dua pucuk senapan mesin, maka posisi berubah menjadi pihak menyerang. Mobil ambulans pasukan Andi Azis nampak mondar mandir mengangkut korban di pihak Andi Azis. Dalam pertempuran ini menimbulkan korban dikedua belah pihak. Pada tengah hari, setibanya rombongan Lettu Andi Sapada dari Makassar yang diikuti pula oleh beberapa perwira lolos dari penangkapan, terus diadakan rapat untuk mengadakan konsolidasi. Diambil keputusan memindahkan pasukan ke Palangga di sebelah selatan Sungguminasa. Setelah Markas Komando dipindahkan ke Palangga. Sekalipun serangan-serangan anak buah Andi Azis dalam kota Makassar berhasil. Tetapi tipu dayanya hendak mengelabui penjaga asrama di Pandang-Pandang Sungguminasa tidak berhasil, bahkan perlawanan gigih telah memukul mundur penyerang. Karena kegagalannya Andi Azis mulai melancarkan berita melalui pers, demikian pula dengan menggunakan surat Letkol A.J. Mokoginta yang diantar oleh Kapten PM Hertasing. Dia menganjurkan agar pasukan yang berada di Pandang-Pandang menyerah untuk mencegah pertumpahan darah selanjutnya (Djarwadi, 1972: 49-50).

Kemudian diperintahkan kepada Andi Unru, dengan membawa kekuatan 1 peleton untuk diperbantukan pada Mobile Batalyon Ratulangi (MBR) dengan tugas mengamankan pantai antara Sungguminasa-Bantaeng. Sedangkan Chatib Lasini dengan kekuatan 1 peleton diperbantukan secara menyamar memasuki Kota Makassar dengan tujuan melaporkan para perwira menengah yang telah menjadi tempat penahanan, sudah diserahkan kepada polisi NIT. Komandan pengawal adalah seorang Indo Belanda bernama van Vlogen berpangkat inspektur polisi terlebih dahulu membawa Mayor H.N. Samual. Beliau kebetulan baru tiba diam-diam dari Manado, bertemu dengan Mayor M. Saleh Lahade di Mess Perwira Tinggi di Jalan Sungai Tangka No. 39 dengan pesan bahwa sebentar malam setelah pidato presiden akan dilakukan tembakan pura-pura ke udara, guna diberi kesempatan kepada perwira-perwira yang ditahan melepaskan diri ke Sungguminasa. Pesan ini masih sempat diteruskan ke Mess Perwira-perwira di Jalan Mongisidi, sehingga setelah tiba waktunya, maka komandan dengan anak buahnya melarikan diri kemudian langsung menuju Palangga Sungguminasa (Djarwadi, 1972: 51).

Pasukan Ghatib Lasini yang telah berhasil mengeluarkan para perwira yang ditawan, kemudian ditugaskan mengamankan wilayah Barru untuk menghadapi pendaratan.

Dalam pasukan ini diperbantukan seorang perwira TNI Lettu La Nakka dan 1 peleton di bawah Andi Selle. Sedangkan MBR di bawah pimpinan Lettu Arief Rate, yang mendapat tugas untuk mengamankan Jeneponto, Bantaeng, dan Sinjai. Di dekat lapangan terbang Mandai ditempatkan pasukan Letda Andi Aminuddin. Menghadapi kenyataan ini maka timbul pertanyaan, apakah Pemerintah NIT sudah mengetahui sebelumnya, para peninjau mengatakan Pemerintah NIT sebagai *een zeer welwilxende houdin* (suatu sikap cukup/menurut tidak membangkang). Beberapa fakta memperkuat dugaan bahwa Pemerintah NIT sudah mengetahui sebelumnya (Anonim, 1984: 16).

Pemerintah NIT mengemukakan bahwa penempatan bekas TNI di NIT mempunyai sudut psikologi penting yang tidak boleh diabaikan, oleh karena bila hal ini tidak diperhatikan dan diberikan penilaian yang khusus, mungkin akan dapat mengacaukan ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah selanjutnya mengemukakan bahwa waktu yang baik menempatkan TNI di NIT adalah pada suatu saat jika *KNIL* sudah direorganisasi menjadi bagian tentara APRIS. Pemerintah mengharapkan agar reorganisasi *KNIL* secepat mungkin dapat dilaksanakan. Sayang sekali hal reorganisasi tersebut belum selesai. Dari 6 kompi pasukan *KNIL* yang ditempatkan di Makassar dan sanggup untuk dimasukkan ke dalam APRIS dan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam tubuh APRIS, baru kompi yang dipimpin oleh Andi Azis (Agung, 1985: 731).

Dengan aksi Andi Azis, maka batalyon Worang mendapat perintah dari markas besar APRIS agar jangan mendarat, sehingga dengan demikian Andi Azis berhasil menghalang-halangi pendaratan APRIS di Makassar. Pemerintah NIT mengeluarkan suatu pernyataan bahwa ia tidak dapat menghalang-halangi terjadinya aksi Andi Azis dan sangat menyesal bahwa hal tersebut terjadi. Kepada angkatan Kepolisian NIT diperintahkan menjaga keamanan dengan ketat (Agung, 1985: 728).⁷

Sementara Batalyon Worang tidak dapat masuk Pelabuhan Makassar, karena dijaga ketat oleh pasukan Andi Azis dan mengancam akan menembak sampai tenggelam apabila Kapal Waikelo mendekat (nama kapal yang ditumpangi Batalyon Worang). Selanjutnya Andi Azis dengan perantara pers menyatakan keinginannya sebagai berikut: 1. NIT harus dipertahankan, 2. Pasukan *KNIL* yang sudah masuk APRIS saja yang bertanggungjawab atas keamanan NIT, apabila kurang akan ditambah dengan pasukan APRIS dari TNI, 3. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta supaya tidak akan bertindak NIT dibubarkan dengan kekerasan (Bardosono, 1956: 23; Kadir, 1984: 236).⁸

Lettu Andi Sapada tanggal 7 April mengeluarkan pengumuman, bahwa kami tidak pernah menerima ultimatum dari siapapun, hanya tanggal 5 April 1950 pagi, kami mendapat serangan di Asrama Pandang-pandang Sungguminasa, pada hari itu juga beberapa tawanan dari Makassar didatangkan ke asrama kami dengan memakai bendera merah putih dan menyampaikan amanat Letkol A.J. Mokoginta, agar kami meletakkan senjata, amanat mana seluruh anggota kami disambut dengan air mata yang bercucuran dan pada saat itu juga diputuskan untuk tidak meyerahkan diri dan senjata. Kami dapat mempertahankan Sungguminasa, agar menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak, menaati amanat Letkol A.J. Mokoginta. Maka kami tanggal 6 April terpaksa meninggalkan asrama dan mengundurkan diri ke daerah pegunungan. Sampai sekarang kami masih mengambil sikap pasif saja, tetapi apabila kami mendapat gangguan sekali lagi, maka kami akan mengadakan operasi besar-besaran di seluruh Sulawesi Selatan, terutama kota Makassar (Anonim, 1984: 14).

Pada tanggal 11 April 1950 Menteri Pertahanan merangkap wakil Panglima Besar Angkatan Bersenjata RIS mengadakan pidato di muka studio RRI, dia menjelaskan bahwa Andi Azis telah memerintahkan pasukannya untuk tidak keluar tangsi dan para

tahanan pada waktu sudah dibebaskan. Selain dari pada itu senjata yang telah dikuasai juga sudah dikembalikan kepada yang bersangkutan. Andi Azis mengajukan permohonan kepada atasannya di Jakarta agar keberangkatannya ke Jakarta ditunda sampai tanggal 13 April 1950 karena dia masih menyelesaikan masalah yang timbul di antara pasukannya, di mana telah timbul keresahan. Permintaan dikabulkan oleh Menteri Pertahanan, dan diharapkan Andi Azis sudah tiba di Jakarta tanggal 13 April 1950 (Agung, 1985: 735).

Setelah menunda pendaratan, akhirnya Batalyon Worang dapat mendarat tanggal 18 April dekat Jenepono di pantai selatan. Para gerilyawan memberikan informasi mengenai lokasi pasukan-pasukan *KNIL*. Polisi bersenjata Belanda dilucuti senjatanya, dengan kaum gerilyawan bertindak sebagai pengawal belakang. Batalyon bergerak ke utara kearah Makassar, dan memasuki kota ini tanpa perlawanan. Karena Andi Azis telah menyerah, Soumokil dan pendukungnya melarikan diri ke Ambon (menurut sumber-sumber RIS dengan pesawat terbang milik Belanda), sehari sebelum pendaratan Batalyon Worang. Namun tidak berada dibawah kekuasaan pasukan-pasukan republik, tanggal 25 April 1950 ia memproklamasikan RMS (Republik Maluku Selatan) yang bebas dari NIT dan RIS. Soumokil menolak bertemu dengan para perunding yang dikirim oleh Pemerintah RIS (yang semuanya orang-orang Ambon), termasuk kepala Misi Militer, Putuhena). Kolonel Kawilarang kemudian diangkat menjadi komandan KMTIT, yang masih perlu mengadakan perundingan yang sulit dengan pasukan-pasukan *KNIL/KL*, dan kaum gerilyawan Sulawesi Selatan yang tidak puas (Harvey, 1989: 169).

Penyerahan diri Andi Azis

Tindak lanjut dari peristiwa ini, maka Pemerintah RIS meminta agar dikirim wakil NIT ke Jakarta untuk memberikan laporan tentang peristiwa ini. Akhirnya tanggal 6 April 1950 berangkat Mokoginta yang didampingi Menteri Penerangan NIT, Dr. J. W. Ratulangi ke Jakarta untuk membicarakan situasi di Sulawesi Selatan. Bersama Pemerintah RIS dan Markas Besar Angkatan Darat, dalam pembicaraan itu Ratulangi menyatakan bahwa tindakan Andi Azis di luar kehendak dan tidak didukung oleh NIT.

Pemerintah RIS melalui telegram lewat presiden NIT Sukowati, yang isinya menyebutkan kalau Andi Azis cepat menghadap ke Jakarta ia tidak akan ditahan tapi akan diselesaikan sebaik-baiknya. Andi Azis membalas surat kepada presiden Sukowati untuk meminta waktu mengenai pemanggilan itu. Akhirnya Andi Azis diberi ultimatum menyerahkan diri selama empat kali 24 jam kepada Andi Azis, sejak tanggal 9 April 1950 (Amir, 2001: 45; Agung, 1985: 735).

Satu hari sebelumnya Andi Azis bersedia memenuhi panggilan menteri Pertahanan di Jakarta, telah diterima perintah dari Letkol Sentot melalui Lettu A. Yusuf di Jakarta. Yang mengirim kurir Nona Andi Nurhani Makkasau yang berisi: 1. Supaya kemampuan tempur pasukan tetap dipelihara, 2. Tidak lama lagi kita akan menyerang dan merebut Makassar, untuk itu supaya pasukan Andi Sapada menempati posisi yang dapat mengamankan pendaratan di Lapangan Terbang Mandai, pantai daerah Barru, pantai jurusan Bantaeng, pantai daerah Sinjai. Oleh sebab itu selama bermarkas di Palangga telah diadakan rapat yang memberi keputusan: 1. Tetap memelihara kekompakan pejuang-pejuang dan daya tempur pasukan, 2. menggalang pasukan pejuang bersenjata Republik Indoneisa dan memelihara daya juang rakyat republik, 3 berusaha melepaskan tawanan, 4. mengadakan kontak langsung dengan Jakarta melalui kurir, 5. melakukan tindakan yang mengamankan pendaratan TNI (Djarwadi, 1972: 51).

Tepat pada tanggal 13 April 1950 Andi Azis menyerahkan diri demikian juga pistolnya, kemudian meminta jaminan kebebasan sesuai dengan telegram tersebut. Selanjut-

nya diperintahkan juga, agar Andi Azis mengkonsinyir pasukannya. Melepaskan semua tawanan akibat peristiwa itu, dan menyerahkan kembali alat-alat senjata yang telah jatuh ketangannya kepada yang berhak. Tuntutan yang terakhir itu ternyata disanggupi oleh Andi Azis dan akan dipenuhi untuk melaporkan diri ke Jakarta tanggal 13 April, pernyataan kesanggupan disampaikan lewat Letkol A.J. Mokoginta. Namun kenyataannya tidak demikian membuat Andi Azis kecewa dan sakit hati, karena kemudian ia ditangkap dan di penjara. Dari pihak Kementrian menganggap ia telah melewati batas waktu yang ditentukan, karena menyerahkan diri sesudah pidato Bung Karno, jadi telah melewati batas waktu yang ditentukan (Wawancara Andi Oddang, tgl 19 Februari 2019).

Pada Kamis, 13 April 1950, 20.15 WIB, dengan melalui radio RIS di Jakarta sebagai Persiden RIS dan panglima tertinggi dari Angkatan Perang RIS telah menyatakan Andi Azis sebagai pemberontak terhadap kekuasaan pemerintah RIS, selanjutnya beliau mempercayakan Angkatan Perang RIS untuk menyelesaikan peristiwa Makassar yang bertentangan dengan hukum negara dan tentara (Bardosono, 1956: 17).

Kementrian Pertahanan RIS menganggap tindakan Andi Azis dengan pasukannya sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum dan disiplin tentara serta menghina sumpah tentara. Dua hari setelah peristiwa tersebut, maka telah dikeluarkan perintah persiapan pasukan ekspedisi ke NIT dengan kekuatan satu divisi yang terdiri dari empat brigade mobil. Sebagai panglima operasi ditunjuk Kolonel A.E. Kawilarang. Pasukan-pasukan ekspedisi terdiri atas satu Brigade Mobile, dari Divisi I Jawa Timur, satu Brigade Mobile dari Divisi IV Jawa Barat, dan satu Batalyon dari Jawa Tengah yang dipimpin oleh Mayor Andi Mattalata. Sebagai Kepala Staf operasi diangkat Letkol Sentot Iskandar (Bardosono, 1985: 21).

Kehadiran pasukan ekspedisi mendapat sambutan gembira dari rakyat, di pihak lain kegembiraan ini juga menjadi pangkal ejekan bagi bekas *KNIL*, yang mengundang terjadinya beberapa kali insiden kecil antara pasukan TNI dan pasukan bekas *KNIL*, namun sebelum ekspedisi tiba di Makassar, yang mendalangi gerakan itu Soumokil dan pendukungnya meninggalkan Makassar dengan menggunakan pesawat Angkatan Perang Belanda menuju Ambon. Batalyon Worang mendarat di Pattontongan dapat memasuki Makassar atas bantuan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS). Pasukan ini yang kemudian menata pendaratan Divisi pasukan ekspedisi sehingga tidak mengalami hambatan (Kadir, dkk, 1984: 241).

Situasi di Makassar sudah berubah membaik, ada pesa khusus dari Komandan Operasi terhadap semua komandan batalyon supaya menjaga benar mobilitas pasukan dengan tidak mencampuri urusan territorial, politik, dan pemerintahan sipil, terhadap pasukan diharapkan berhati-hati dan bijaksana. Pada upacara 17 Agustus 1950, Presiden Sukarno mengumumkan pembubaran RIS dan menyatakan kembali terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejak saat itu semua negara bagian dinyatakan bubar bersama kabinetnya. Terbentuknya NKRI berdasarkan Undang Undang dasar Sementara 1950 yang disahkan pada 15 Agustus 1950 dan diumumkan ke seluruh pelosok tanah air.

Akhirnya setelah Andi Azis menyerahkan diri di Jakarta kemudian ditahan di CPM Guntur Jakarta selanjutnya diadili ditahanan militer di Yogyakarta tahun 1953, dengan saksi-saksi antara lain: Letkol Mokoginta, dan Bekas Presiden NIT Sukowati, hakim oleh R.S. Gandasubrata, dan Jaksa Mr. Imam Bardjo. Persidangan Andi Azis berlangsung cukup panjang dan lama dari 25 Maret 1953 selanjutnya keputusannya pada tanggal 9 April 1953 dengan dijatuhi hukuman 14 Tahun di potong waktu selama ditahan. Putusan pengadilan antara lain menyatakan.....

Mengadili

Menerangkan bahwa
Andi Abdul Azis
Telah menjalankan kejahatan
“Pemberontakan tentara”
Menghukum terdakwa oleh sebab itu dengan hukuman penjara selama:
14 (empat belas tahun) (Anonim, 1953: 299)

Menentukan bahwa hukuman itu harus dikurangi dengan waktu selama terdakwa ditahan di CPM dan rumah penjara sampai hari putusan ini mendapat kekuatan. Menunjuk terhukum sebagai pihak yang harus memikul biaya perkara-perkara ini. Demikian putusan ini dinyatakan pada hari: Rabu tanggal 8 April 1953 oleh kami Letkol RST Gandasubrata, ketua pengadilan tentara di Yogyakarta dan pada hari itu juga putusan ini oleh ketua tersebut diumumkan dengan dihadiri oleh Mayor Slamet Cokroprawiro, anggota-anggotanya Mayor Mr. Imam Bardjo, Jaksa tentara Kapten RP. Muhammad Mukhtar Suryaningrat, Panitera dan Terhukum tersebut (Anonim, 1953: 299)

Pada tahap pertama ia ditahan di rumah penjara Wiraguna Yogyakarta selama tiga tahun, kemudian dipindahkan ke Cimahi. Di Cimahi ia ditahan tiga tahun dan sempat pula berontak dengan melucuti penjaga, tetapi dapat ditangkap kembali. Kemudian ia dipindahkan ke Penjara Ambarawa. Menurut Andi Azis waktu dipenjara ia didatangi oleh utusan Presiden Soekarno (sabar) untuk menghadap Presiden Soekarno untuk menjadi komandan Cakrabirawa tetapi ditolak. Andi Azis menjalani hukuman hingga selesai di Jakarta, selama setahun sesudah dilepas ia masih diharuskan melapor kepada yang berwajib setiap hari senin. Pasukan-pasukannya setelah Andi Azis menyerah kemudian menyerahkan diri kepada pasukan TNI (Kapten Hertasning), selanjutnya pengamanan berjalan lancar.

Andi Azis kemudian dibebaskan tahun 1958 dan menetap di Jakarta, tetapi belum pernah kembali ke Makassar hingga masa orde baru. Namun sekitar tahun 1970 ia kembali ke Makassar, terakhir mengunjungi Makassar tahun 1983. Setelah keluar dari penjara ia terjun ke dunia bisnis dan bergabung bersama Soedarpo Sastro Satono di perusahaan pelayaran Samudra hingga akhir hayatnya. Andi Azis meninggal tanggal 30 Januari 1984 di Rumah Sakit Husada Jakarta, karena sakit jantung. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Tuwung Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Demonstrasi massa untuk membubarkan NIT di susul lagi informasi yang ada bahwa akan datang bantuan TNI dari Jawa untuk mengamankan Makassar, Bantuan TNI ini adalah satu Batalyon yaitu Batalyon Worang. Melihat kenyataan ini beberapa orang yang mendukung NIT sejak dari awal seperti Soumokil dan Andi Azis dan petinggi NIT lainnya melakukan pertemuan-pertemuan. Meskipun beberapa petinggi NIT menyambut baik kedatangan Batalyon Worang dan tetap menjaga kondisi dengan baik. Menurut Pemerintah NIT ini sudah terjadi dan dia tidak dapat menghalangi Andi Azis melakukan semacam gerakan. Namun tidak bagi Soumokil yang sangat mempertahankan berdiri NIT, oleh sebab itu ia menghasut Andi Azis, bahwa ini tidak bisa dibiarkan dan perlu didahului oleh aksi. Bagi Andi Azis yang juga mendukung NIT, dan menginginkan NIT tetap berdiri, selain itu sangat mengharapkan anggota –anggota *KNIL* segera masuk APRIS. Selanjutnya bagi NIT sendiri yang ingin membentuk negara federasi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tentu mendapat penentangan bagi pendukung republik, yang menginginkan tetap berdirinya negara kesatuan.

Andi Azis adalah sosok yang sejak kecil berada dalam kehidupan orang Belanda

bahkan sejak kecil sudah pernah ke Belanda, tentu kehidupannya juga sudah ke Belanda-belandaan. Kemudian ditunjang juga cita-citanya ingin menjadi komandan, meskipun jiwa militernya sudah ada hanya cenderung berpihak ke Belanda. Tentu ini mendapat penentangan dengan orang-orang pendukung negara kesatuan. Andi Azis telah melakukan aksi yaitu melumpuhkan hampir seluruh Kota Makassar dan menguasai beberapa akses-akses militer dan menahan Petinggi militer yaitu Letkol Mokoginta beserta stafnya sehingga oleh Presiden Soekarno, Andi Azis dianggap sebagai pemberontak. Oleh sebab itu keputusan pemerintah, Andi Azis harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, Andi Azis menerima keputusan pengadilan karena sebagai tentara harus tunduk pada Mahkamah Militer.

Dibalik gerakan yang dilakukan Andi Azis tidak lepas dari peranan seseorang, yang bernama Dr. Soumokil. Beberapa hari sebelum pendaratan Batalyon Worang, Soumokil melarikan diri ke Ambon. Andi Azis menjalankan hukumannya meskipun dengan merasa kecewa, karena ia merasa pemerintah tidak menepati janji, apabila ia menyerahkan diri, maka Andi Azis tidak dihukum. Akan tetapi oleh Pemerintah Andi Azis harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagai seorang militer seyogyanya dia yang menjaga stabilitas keamanan bukan mengacaukan hingga menimbulkan korban di kedua belah pihak. Andi Azis telah melakukan tindakan makar memberontak terhadap Pemerintah yang sah. Sementara bekas menteri-menteri Kabinet Diapari dan pemuka-pemuka golongan federalis yang ditahan kemudian dilepaskan tanpa diadili. Karena keterlibatan mereka dalam peristiwa Andi Azis tidak dapat dibuktikan, sedangkan mengenai NIT dianggap bubar pada tanggal 15 Agustus 1950.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip NIT No. 97, Warta Politik Negara Indonesia Timur.
- Arsip Pemda Tanah Toraja, No. 802.
- Agung, Ide Anak Agung Gde. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amir, Muhammad. 2001, *Pertentangan antara Unitaris dan Federalis di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan.
- Anonim. 1953. Provinsi Sulawesi, Kementrian Penerangan Republik Indonesia
- Anonim. 1978. Penumpasan Pemberontakan Separatisme di Indonesia: Bandung: Dinas Sejarah TNI dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66.
- Anonim. tt. Jarah Dam IV Hasanuddin, 25 Tahun Kodam IV Hasanuddin 1957-1982.
- Babie, Earl R. 1979. *The Practice of Social Research*. Belmont California: Wadsworth Publishing Company, Inc.
- Anonim, 1991. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bardosono. 1956. *Peristiwa Sulawesi Selatan 1950*. Jakarta: Yayasan Pustaka Militer.
- Djawardi, Radik, dkk. 1972. Naskah Sejarah Corps Hasanuddin, Prajurit Tempur dan Pembangunan, Sekretaris Jender 1. Corhas, MCMLXXIL.

- Gurr, Ted Robert. 1970. *Why Men Rebel*. New Jersey: Princenton University Press.
- Harvey, Barabara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: PT. Pustaka utama Grafiti.
- Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Bappeda Tk. I Provinsi Sulawesi Selatan dengan UNHAS.
- Lahadjji, Patang. 1976. *Sulawesi dan Pahlawan-Pahlawannya*. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Generasi Muda Indonesia.
- Poelinggomang, Edward L, dkk. 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan jilid 2*. Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Puar, Yusuf A. 1956. *Peristiwa Republik Maluku Selatan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Pye, Lucian, *The Roots of insurgency and Development of Rebellion*.
- Said, Ma'sum dan Emi Nurhayati. 2007. Pengaruh Lingkungan Keluarga Dalam membentuk kepribadian anak. <http://salehpadi.wordpress.com>, diakses tanggal 27 Desember 2016.
- Smelser, Neil. 1971. *Theory of Collective Behavior*. New York: The Free Press.
- H. Andi Oddang, 83 tahun Ketua Legiun veteran Sulawesi Selatan, wawancara di Makassar, tanggal 19 Februari 2008.
- H. Abd. Razak Djalle, 78 tahun, Sekretaris Legiun Veteran Sulawesi Selatan, wawancara di Makassar, tanggal 28 Februari 2008.

CATATAN AKHIR

1. Selama masa antara setelah KMB hingga penyerahan kedaulatan (Agustus hingga Desember 1949) Pemerintah Belanda membebaskan sekitar 12.000 orang berhaluan republik yang berhasil ditawan selama usaha pemerintah Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia
2. Bagi NIT sangat khawatir dengan kedatangan APRIS di Makassar, yang terdiri dari pemuda-pemuda bekas pejuang dari Indonesia Timur. Apalagi di Makassar sedang terjadi gejolak politik yang diakibatkan oleh pertentangan antara golongan federalis (federasi) dan unitaris (kesatuan).
3. Dasar hukum keputusan Presiden RI untuk membubarkan negara-negara dan daerah-daerah dan menggabungkan dalam RIS adalah UU darurat tanggal 8 maret 1950, akan tetapi dalam UU darurat itu dinyatakan dengan jelas bahwa pergantian status suatu daerah harus berjalan melalui proses yang demokratis. Namun proses demokrasi sebagai ditetapkan dalam UU darurat tidak dijalankan, akan tetapi pemerintah federal di Jakarta bahwa demonstrasi yang diadakan dapat dianggap sebagai suatu pernyataan demokrasi keinginan rakyat.
4. Sekembalinya dari Yogyakarta Makkaraeng Daeng Manjarungi dan Riri Amin Daud, maka tanggal 17 April 1950 di Polombangkeng mengeluarkan suatu resolusi: daerah-daerah dibawah kekuasaan BPRRI dengan para pejuang gerilya menyatakan melepaskan diri dari kekuasaan Undang-Undang dan pemerintah NIT dan akan mempertahankan daerah kami sebagai yang terikat dan tunduk kepada pemerintah RI di Yogyakarta. Resolusi itu kemudian dikenal dengan Konferensi Polombangkeng
5. Jumlah pasukan KNIL di Sulawesi Selatan sekitar 3000-4000 orang, pada bulan Maret 1950 TNI yang menjadi anggota dari KMTIT hanya 40 orang dan satu pleton CPM sebanyak 70 orang. Untuk persiapan bagi pejuang yang akan dilebur menjadi APRIS sekitar 360 orang yang ditampung di Pandang-pandang untuk mengikuti latihan.
6. Letkol A.J. Mokoginta ditawan tepatnya subuh 05.00 WITA, saat itu Andi Azis mengetuk pintu Mokoginta, ajudannya letnan dua Tumbelaka (karena ajudannya Andi M. Yusuf ditugaskan ke Jakarta untuk menyertai raja-raja Makassar ingin bertemu dengan Presiden Sukarno. Andi Azis mengetuk pintu Letkol A.J. Mokoginta, diminta Andi Azis untuk ikut ke kampnya, tentu saja sebagai

atasan ini ditolak, Letkol A.J. Mokoginta menelpon Andi Azis tapi sudah diputuskan salurannya, menurutnya dia sendiri yang akan ke markasnya, tapi ditolak dan dicegat dipintu oleh anak buah seorang bintara dan tiga orang anak buahnya dengan mengunci pintu mengingat istrinya ada didalam rumah dengan maksud akan memberikan perlawanan sebisa mungkin, tapi ternyata dari luar diancam dengan peringatan bahwa dengan menyerahkan diri tidak diapa-apakan. Demi pertimbangan tertentu Letkol A.J. Mokoginta keluar bersama-sama dengan stafnya ke kamp Andi Azis.

7. Sebagai kelanjutannya Jaksa Agung Soumokil memerintahkan untuk menggeledah di rumah pemimpin-pemimpin unitaris untuk mencari dokumen yang ada sangkut pautnya dengan kedatangan APRIS, demikian juga dengan kantor komandan APRIS Letkol Mokoginta.
8. Oleh karena sampai tanggal 13 April Andi Azis belum juga melaporkan diri ke Jakarta, maka pada malam jam 20.15 Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS menyatakan Andi Azis sebagai pemberontak terhadap kekuasaan bpemerintah RIS. Dan untuk diperintahkan kepada angkatanperang RIS untuk mengambil tindakan menyelesaikan peristiwa Makassar dengan mengirimkan pasukan-pasukan ekspedisi ke Indonesia Timur (Makassar)